



PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2025

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dapat tersusun tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Perubahan Rencana Aksi Kinerja disusun dalam rangka penyesuaian arah kebijakan untuk mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur serta Bupati terpilih periode 2025-2029. Perubahan Rencana Aksi Tahun 2025 memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang didasari pada kondisi, potensi, permasalahan dan tujuan pembangunan daerah Tahun 2025.

Pada awal tahun 2025 Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Sehingga seluruh Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Perangkat Daerah melakukan penyesuaian anggaran dalam rangka tindak lanjut dari kebijakan efisiensi anggaran.

Semoga Perubahan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Singaparna, Desember 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....3

 1.1 Latar Belakang3

 1.2 Maksud dan Tujuan.....6

 1.3 Sistematika Penulisan7

BAB II RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....8

 2.1 Rencana Kerja (RENJA).....8

 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)8

 2.3 Perjanjian Kinerja.....12

BAB III PERUBAHAN RENCANA AKSI.....15

BAB IV PENUTUP.....25

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2025 pada awalnya disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan daerah. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat dinamika kebijakan dan kondisi yang menuntut penyesuaian terhadap rencana yang telah ditetapkan.

Perubahan kebijakan nasional maupun daerah terkait pengelolaan keuangan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta penyesuaian terhadap sistem pengelolaan berbasis digital mengharuskan adanya penyesuaian strategi pelaksanaan program. Selain itu, terdapat perubahan prioritas pembangunan daerah, penyesuaian struktur anggaran, perkembangan regulasi perpajakan daerah, serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya yang perlu diakomodasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2025.

Aspek internal organisasi seperti perubahan struktur, ketersediaan SDM, kapasitas perangkat daerah, serta penguatan proses monitoring dan evaluasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi perlunya penyempurnaan dokumen Rencana Aksi. Kondisi tersebut menuntut BPKPD melakukan review terhadap capaian program, indikator kinerja, serta tahapan kegiatan agar pelaksanaan pada tahun berjalan tetap relevan, adaptif, efektif, dan akuntabel. Dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan tersebut, maka dilakukan perubahan terhadap Rencana Aksi BPKPD Tahun 2025 sebagai upaya penyelarasan dengan kebijakan terbaru, peningkatan efektivitas capaian kinerja, serta untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Perubahan Rencana Aksi Kinerja sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Perubahan Rencana Aksi pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam melaksanakan program/kegiatan pada DPPA Tahun Anggaran 2025 serta program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025.

Perubahan Rencana Aksi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu:

- 1) Penyesuaian arah kebijakan untuk mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur serta Bupati terpilih periode Tahun 2025 – 2029;
- 2) Terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien. Hal yang harus dilakukan efisiensi berdasarkan Inpres tersebut diantaranya:
 - a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 - b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 - d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur; dan

- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Terdapat perubahan prioritas program kegiatan yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029;
- 4) Terdapat perubahan target pada indikator kinerja tujuan BPKPD untuk tahun 2025-2026 berdasarkan hasil reviu oleh TIM Reviu IKU bahwa hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024 telah melampaui target pada tahun 2025 dan 2026, sehingga Perlu melakukan penyesuaian target;
- 5) Terdapat perubahan target pada indikator kinerja utama BPKPD untuk tahun 2025-2026 berdasarkan hasil reviu oleh Tim Reviu IKU diantaranya:
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Capaian Indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat pada tahun 2024 memperoleh nilai 87,52 kategori A atau predikat "Sangat Baik". Capaian tersebut juga telah melampaui target pada tahun 2025, maka perlu menetapkan target nilai RB di atas capaian Tahun 2024 untuk tahun 2025-2026;
 - b. Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan
Jumlah Bidang Tanah dan Kendaraan mengalami perubahan pada tahun 2024. Perubahan tersebut dikarenakan adanya revisi hasil dari temuan BPK RI, pemeriksaan lapangan, perhitungan MCP, Hibah dari PSU, hibah atas Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta adanya belanja modal tanah/bangunan untuk infrastruktur. Sedangkan untuk bukti kepemilikan kendaraan (BPKB), terdapat perubahan jumlah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimana sebelumnya jumlah kendaraan sebanyak 3.240 unit kendaraan menjadi 2.911 unit kendaraan. Perubahan data akan berpengaruh secara signifikan terhadap capaian indikator Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan sehingga perlu penyesuaian target pada tahun 2025 dan 2026 sesuai dengan data yang tersedia;
 - c. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat

penambahan jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penambahan pajak itu yaitu Opsen PKB dan BBNKB, sehingga terdapat penambahan target penerimaan pajak daerah yang meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- 6) Terdapat rasionalisasi anggaran sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran dan kebijakan anggaran karena adanya defisit anggaran yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 7) Penambahan atau pengurangan target indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan, serta penambahan/pengurangan dan pergeseran pagu anggaran sub kegiatan;
- 8) Terdapat penambahan sub kegiatan dalam rangka mendukung implementasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan pengelolaan Retribusi; dan
- 9) Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran BPKPD Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Aksi kinerja sasaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan sebagai salah satu referensi sekaligus sebagai panduan untuk mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja. Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Aksi kinerja sasaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2025 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran startegis dan IKU dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mempermudah dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2025; dan
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan doumen Perubahan Rencana Aksi Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.
Bab II Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja	Menyajikan mengenai Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
Bab III Perubahan Rencana Aksi	Menyajikan Perubahan Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
Bab IV Penutup	Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan Perubahan Rencana Aksi.

BAB II RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Kerja (RENJA)

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur penunjang pengelola keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah **“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima”**. BPKPD memiliki tugas yang strategis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati, untuk menunjang tujuan strategis tersebut maka disusunlah sasaran strategis agar tujuan tersebut tercapai.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang akan digunakan untuk periode tahun 2021-2026 sesuai dengan periode Renstra yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 100.1.6/KEP.17/BPKPD/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Nomor PR.10.06/ Kep.60/ BPKPD/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
				2020	2021	2022	2023	2025	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2025	2025	2026
I	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	59,06	66,489	67,50	78,019	79,00	80,00	81,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	65	69	78,25	87,60	87,75
											Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100

[illegible]

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	87,60
2.	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
3.	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	83,49%
4.	Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	51,16%

Tabel 2.3

**Perubahan Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	87,60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		38.816.554.467,00	36.075.953.162,00
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233.000.000,00	173.047.953.162,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.126.913.147,00	30.108.238.872,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	482.425.800,00	149.290.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.438.801.037,00	1.831.962.707,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	424.801.200,00	514.901.200,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.838.950.000,00	1.836.850.000,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.271.663.283,00	1.461.663.283,00

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

2.	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		704.787.153.003,00	697.836.827.042,00
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.662.640.000,00	2.294.756.500,00
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	531.261.000,00	404.198.000,00
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	709.300.000,00	538.751.500,00
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	700.883.952.003,00	694.599.121.042,00
3.	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	83,49%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.773.202.000,00	1.516.293.500,00
4.	Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	51,16%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.769.099.844,00	5.112.067.770

Sumber: BPKPD 2025, diolah

BAB III PERUBAHAN RENCANA AKSI

Perubahan Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dituangkan secara berkala. Adapun Perubahan Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGE T KINERJ A SASAR AN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET KEG IAT AN	TARGET BULAN KE-												PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi	87,6	-	-	-	87,6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah		83							82						30.281.285.972,00	SEKRETARIAT
									Meningkatkan Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah		87,00									87,00		5.794.667.190,00	SEKRETARIAT		
								Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	106	14	6	8	11	4	2	11	5	2	14	8	21	173.047.100,00	SEKRETARIAT
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	33	8	4	3	0	1	0	1	3	0	3	3	7	126.941.400,00	SEKRETARIAT
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	73	6	2	5	11	3	2	10	2	2	11	4	15	46.105.700,00	SEKRETARIAT
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Persen	100 %	7,1 4%	7,1 4%	14, 29%	7,1 4%	7,1 4%	14, 29 %	7,1 4%	7,1 4%	7,1 4%	7,1 4%	7,1 4%	7,1 4%	30.108.238.872,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	94	97	97	194	97	97	194	97	97	97	94	94	94	30.108.238.872,00	SEKRETARIAT
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Kapasitas ASN BPKPD	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	Persen	100 ,00 %	0,0 0%	6,2 5%	0,0 0%	0,0 0%	6,2 5%	0,0 0%	0,0 0%	0,0 0%	18, 75 %	0,0 0%	6,2 5%	62, 50 %	149.290.000,00	SEKRETARIAT
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Menyediakan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	61.690.000,00	SEKRETARIAT

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGE T KINERJ A SASAR AN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET KEG IAT AN	TARGET BULAN KE-												PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Bimbingan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan undangan	Orang	8	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	1	2	87.600.000,00	SEKRETARIAT
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100 %	0,0 0%	11, 11 %	27, 78%	0,0 0%	0,0 0%	16, 67 %	0,0 0%	0,0 0%	16, 67 %	0,0 0%	0,0 0%	27, 78 %	1.831.962.707,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	40.750.000,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.466.740,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	60.915.967,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	105.000.000,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Menyediakan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	Paket	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.323.000,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	106.000.000,00	SEKRETARIAT
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	130.000.000,00	SEKRETARIAT
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	445.100.000,00	SEKRETARIAT
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Melaksanakan penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	48.407.000,00	SEKRETARIAT
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	Persen	100 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 %	514.901.200,00	SEKRETARIAT
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Menyediakan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Di sediakan	Unit	22	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	220 0%	514.901.200,00	SEKRETARIAT

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGE T KINERJ A SASAR AN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET KEG IAT AN	TARGET BULAN KE-												PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100 %	38,89 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	1.836.850.000,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.097.650.000,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000.000,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	651.200.000,00	SEKRETARIAT
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100 %	2,78 %	2,78 %	2,78 %	2,78 %	2,78 %	2,78 %	2,78 %	2,78 %	2,78 %	2,78 %	2,78 %	69,44 %	1.461.663.283,00	SEKRETARIAT
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melaksanakan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	70	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	799.990.000,00	SEKRETARIAT
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	372.748.483,00	SEKRETARIAT
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	288.924.800,00	SEKRETARIAT	
	2	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	12,04 %	17,59 %	17,59 %	52,78 %	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100 %	5,99 %	3,96 %	3,96 %	4,23 %	8,39 %	9,34 %	7,56 %	6,75 %	2,20 %	8,77 %	5,36 %	27,67 %	697.836.827.042,00	

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGE T KINERJ A SASAR AN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET KEG IAT AN	TARGET BULAN KE-												PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Menyelenggarakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persen	100 %	9,0 %	2,2 %	2,2 %	0,0 %	5,7 %	0,0 %	0,0 %	18,18 %	0,0 %	18,18 %	12,62 %	22,73 %	2.294.756.500,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	79.684.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	79.684.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Tahun 2026	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	73.568.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Tahun 2025	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	73.568.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Tahun 2025	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.003.500,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Tahun 2025	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	69.893.500,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	149.908.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	159.960.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	567.391.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	567.698.000,00	BIDANG ANGGARAN

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGE T KINERJ A SASAR AN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET KEG IAT AN	TARGET BULAN KE-												PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
				TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
								Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembinaan Penganggaran Daerah Kepada OPD, Kecamatan, dan BLUD	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	398	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	198	0	406.398.500,00	BIDANG ANGGARAN
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Menyelenggarakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen	100 %	10, 42 %	4,1 7%	4,1 7%	10, 42 %	4,1 7%	4,1 7%	22, 92%	4,1 7%	4,1 7%	10, 42 %	4,1 7%	16, 67 %	404.198.000,00	BIDANG PERBENDAHARAA N	
								Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Melaksanakan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	236	59	0	0	59	0	0	59	0	0	59	0	0	49.970.000,00	BIDANG PERBENDAHARAA N	
								Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Melaksanakan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	195.752.000,00	BIDANG PERBENDAHARAA N	
								Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Melaksanakan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	26.266.000,00	BIDANG PERBENDAHARAA N	
								Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi Pajak dan Menyusun Laporan pph atas laporan penerimaan kas	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	132.210.000,00	BIDANG PERBENDAHARAA N	
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Menyelenggarakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koodinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen	100 %	1,6 8%	6,6 2%	6,6 2%	3,7 2%	20, 91 %	30, 43 %	4,5 6%	1,8 6%	1,8 6%	3,7 2%	1,8 6%	1,8 6%	538.751.500,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	
								Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Melaksanakan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	14	0	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	73.996.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEGIATAN	TARGET BULAN KE-												PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
							Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	17	2	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	111.588.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Laporan	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	134.514.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
							Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	123.528.500,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
							Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	108	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	45.805.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
							Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	49.320.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Menyelenggarakan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100 %	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	69, 44 %	694.599.121.042,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
							Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Melaksanakan Penyaluran Dana Desa, Alokasi dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	645.565.440.000,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
							Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Melaksanakan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30.884.018.082,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
							Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18.149.662.960,00	BIDANG PERBENDAHARAAN

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGE T KINERJ A SASAR AN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET KEG IAT AN	TARGET BULAN KE-												PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	3	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	83,49 %	-	-	-	83,49 %	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	Persen	89 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	89 %	1.516.293.500,00	BIDANG ASET DAERAH	
								Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100 %	2,0 8%	2,0 8%	14, 58%	2,0 8%	2,0 8%	14, 58%	2,0 8%	2,0 8%	14, 58 %	2,0 8%	39, 58 %	1.516.293.500,00	BIDANG ASET DAERAH	
								Penyusunan Standar Harga	Menyusun Standar Harga Tahun 2027 dan Standar Harga Perubahan Tahun 2025	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.915.000,00	BIDANG ASET DAERAH	
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2026	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19.088.000,00	BIDANG ASET DAERAH	
								Pengamanan Barang Milik Daerah	Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah yaitu: 1. Melaksanakan Pensertifikatan BMD sebanyak 600 sertifikat 2 Membuat 55 Plang BMD	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Laporan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.011.747.500,00	BIDANG ASET DAERAH	
								Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Melaksanakan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	384.543.000,00	BIDANG ASET DAERAH	
Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah	4	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	51,16 %	-	-	-	51,16 %	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persen	100 %	4,2 2%	4,5 7%	3,1 9%	8,5 3%	3,1 9%	2,8 4%	14, 57%	2,5 0%	20, 00 %	5,0 0%	3,8 8%	27, 50 %	5.112.067.770,00	
								Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persen	100 %	4,2 2%	4,5 7%	3,1 9%	8,5 3%	3,1 9%	2,8 4%	14, 57%	2,5 0%	20, 00 %	5,0 0%	3,8 8%	27, 50 %	5.112.067.770,00	
								Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Melaksanakan studi banding	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	133.049.500,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	
								Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Melaksanakan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	168.283.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGE T KINERJ A SASAR AN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET KEG IAT AN	TARGET BULAN KE-												PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
				TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	147.919.500,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	39	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	33	2.137.308.250,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah	
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Objek PBB- P2dengan target sebagai berikut: 1. Pendataan 500 objek pajak bangunan baru dan data baru PBB-P2 2. Pendataan 20 objek pajak khusus PBB-P2 3. Pendataan dan pemutakhiran 50 Objek Pajak non PBB-P2	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib pajak daerah	Laporan	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	228.548.500,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
								Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Melaksanakan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	49	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	49	75.397.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Melaksanakan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	1	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1.057.149.320,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah	
								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Melaksanakan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	53.752.700,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah	
								Penagihan Pajak Daerah	Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	820.252.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah	
								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Melaksanakan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan tahapan sebagai berikut: 1. Melaksanakan Rapat Evaluasi PAD 2. Melaksanakan Rapat Penyusunan dan Perubahan Target PAD 3. Melaksanakan Rapat Evaluasi PBB-P2 4. Melaksanakan Penertiban 70 Objek Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	4	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	186.264.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	

PERUBAHAN RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGE T KINERJ A SASAR AN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET KEG IAT AN	TARGET BULAN KE-												PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
				TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
								Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Melaksanakan Pembinaan kepada OPD pengelola retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24.217.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
								Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Melaksanakan high level meeting implementasi ETPD Tahun 2025	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	79.927.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH																								740.541.141.474,00			

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Aksi ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, kebutuhan organisasi, serta perkembangan pelaksanaan program pada tahun berjalan. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, ketercapaian target kinerja, serta mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Rencana Aksi yang telah diperbaharui ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, sehingga pelaksanaannya tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pembangunan daerah, serta prinsip good governance. Oleh karena itu, seluruh unsur pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah agar menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian kinerja Tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Aksi ini disusun dengan harapan dapat memberikan arahan yang jelas dan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas serta fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi referensi dalam proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tasikmalaya, Desember 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003